

# Administrative Services for Making Marriage Certificates at the Office of Religious Affairs, Jejaw District, Ogan Komering Ilir Regency

*by Rizal Fahlevi*

---

**Submission date:** 24-Dec-2021 02:16PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 1735572836

**File name:** artikel-iso-rizal-fahlevi.pdf (290.35K)

**Word count:** 4260

**Character count:** 28446

## National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM-MP) in Realizing Welfare in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency

### Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Mewujudkan Kesejahteraan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Rizal Fahlevi <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi

Email: <sup>1)</sup> [arisfasemi60@gmail.com](mailto:arisfasemi60@gmail.com)

#### How to Cite :

Fahlevi. R. (2021). National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM-MP) in Realizing Welfare in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. *Jurnal ISO* (Vol 1, No 2) 35-42 DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v1i2>

#### ARTICLE HISTORY

Received [29 October 2021]

Revised [5 November 2021]

Accepted [12 November 2021]

#### KEYWORDS

Empowerment, Independent, and Prosperous.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sehingga pemerintah memprogramkan bantuan yang diperuntukkan bagi penduduk miskin, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah terlaksana dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

#### ABSTRACT

Community empowerment is an effort to increase the dignity of the community layer out of the trap of poverty and underdevelopment so that the government programs assistance intended for the poor, one of which is the National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM-MP). The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the implementation of the National Program for Independent Rural Community Empowerment (PNPM-MP) in Kenten Laut Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency has been carried out well, especially with regard to the implementation of infrastructure development.

## PENDAHULUAN

Banyak program yang dibuat untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, program tersebut lebih mengarah kepada hasil sementara. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya program pengentasan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.

Ada beberapa program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu penduduk miskin, termasuklah salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan, yang dimulai dari sejak tahun 2007 hingga kini. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Yang

kesemuanya ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi beban masyarakat miskin yang setiap tahunnya semakin bertambah.

Tujuan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ditemukan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan masih terdapat masalah Antara lain:

1. Terdapat kelemahan dalam hal pendampingan.
2. Peran serta masyarakat dalam usulan rencana pembangunan masih sangat minim.
3. Masyarakat miskin dipersilakan memilih sendiri program yang ingin dilakukan, namun terkadang hal tersebut bertentangan dengan peraturan PNPM M-P.
4. Pemanfaatan dana bantuan yang diperoleh belum tepat sasaran.

## LANDASAN TEORI

### Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Menurut Kartasasmita yang diangkat oleh Mardikanto (2013 : 53) penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

### Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Berdasarkan Pedoman umum PNPM Mandiri dan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Bahwa Pemberdayaan masyarakat di Indonesia Berawal dari menurunnya kinerja ekonomi Indonesia dan meningkatnya angka kemiskinan pada pertengahan 1990, Pemerintah Orde Baru mulai menyadari untuk mengubah pendekatan pembangunannya. Trilogi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ternyata gagal membuat masyarakat perdesaan menjadi sejahtera. Bukan hanya itu, bangunan ekonomi Indonesia juga melahirkan kesenjangan yang sangat besar di berbagai bidang.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Orde Baru mulai menggagas pembangunan yang berorientasi perdesaan dengan meluncurkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1994. Program IDT bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan dengan memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat (POKMAS) dengan model pengelolaan dana bergulir. Program IDT masih dianggap belum cukup, maka pada tahun 1996, pemerintah kembali meluncurkan program P3DT yang dikhususkan untuk memperbaiki infrastruktur perdesaan dan membuka isolasi yang menjadi penghambat berkembangnya usaha-usaha masyarakat di perdesaan. Belajar dari kelemahan dan kekuatan IDT dan P3DT, kemudian Pemerintah merancang Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menggabungkan dua kegiatan tersebut ke dalam satu program besar. PPK mulai diuji coba pada tahun 1997 di empat provinsi, kemudian diimplementasikan secara terbatas di 16 provinsi pada tahun 1998. Dan satu tahun kemudian, pemerintah kembali meluncurkan PPK Perkotaan (P2KP) untuk diuji coba di beberapa kota, yang diharapkan menjadi solusi bagi kemiskinan di perkotaan.

Setelah berjalan kurang lebih tujuh tahun, PPK bermutasi menjadi PNPM-PPK pada tahun 2005 - 2006 dengan melakukan beberapa perbaikan pada mekanisme dan struktur programnya. Karena dianggap berhasil membangun wilayah perdesaan, maka pada tahun 2007 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program ini dengan nama PNPM Mandiri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setelah peluncuran tersebut, maka PNPM Mandiri Perdesaan telah menjadi program pemberdayaan masyarakat terbesar dan telah menjangkau hampir seluruh wilayah perdesaan Indonesia.

### Prioritas Kegiatan Dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan

Maksud dari prioritas kegiatan adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Ada beberapa kriteria jenis kegiatan yang bisa dibiayai oleh dana PNPM Mandiri Perdesaan, Mekanisme dalam memberikan usulan kegiatan dan kegiatan yang tidak boleh menggunakan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Hal-hal tersebut adalah :

**1. Kriteria dan Jenis Kegiatan**

- a. Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dana bergulir diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :
  1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
  2. Memenuhi kebutuhan antar desa dan atau antar kecamatan.
  3. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.
  4. Berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi perdesaan.
  5. Dapat dikerjakan oleh masyarakat.
  6. Didukung oleh sumber daya yang ada.
  7. Memiliki potensi berkembang dan berkembang.
  8. Mendukung kualitas lingkungan hidup dengan tidak merusak lingkungan hidup.
- b. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :
  1. Kegiatan Pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin di dalam desa atau antar Desa / Kelurahan atau sebutan lainnya.
  2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
  3. Kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
  4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.
  5. Kegiatan Usulan Pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.
  6. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- c. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana bergulir adalah :
  1. Pendanaan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dapat didanai dari alokasi SPP dan UEP yang telah diputuskan melalui MAD.
  2. Pendanaan kegiatan permodalan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) hanya dapat didanai dari alokasi UEP yang sudah ada.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 9). "Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi".

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mendapatkan data mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM M-P) dalam Mewujudkan Kesejahteraan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada 12 orang informan yaitu Ibu Pujia Irani, S.STP.,M.Si selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut serta Masyarakat di Desa Kenten Laut. Data yang terkumpul akan dianalisa dan diolah. Setelah dilakukan analisa diharapkan hasil tersebut menjawab permasalahan yang ada.



### **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM M-P) di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM M-P) adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, yang di dalamnya juga meliputi segala perlengkapan dan alat-alat yang diperlukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, meliputi dua hal yaitu : Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Key Informan* dalam beberapa indikator pelaksanaan program PNPM. Antara lain :

#### **a. Sarana dan Prasarana**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ibu Pujia Irani, S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menjadi fokus pembangunan Prasarana Sarana yang menggunakan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu Jalan atau Cor Beton, Gedung Posyandu, Poskesdes dan Gedung PAUD, (wawancara 23 Maret 2018).

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa prasarana sarana pembangunan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ditujukan kepada sektor-sektor yang dapat menunjang akses kegiatan masyarakat antara lain dimanfaatkan dalam Pembangunan jalan, Jembatan, dan Dermaga, (wawancara 23 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala desa Kenten Laut bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masuk agar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk membangun akses jalan. Sebab hal tersebut merupakan kebutuhan yang mendasak bagi masyarakat, (wawancara 27 Maret 2018).

Berdasarkan observasi peneliti dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk pembangunan prasarana sarana infrastruktur di Desa Kenten Laut di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adanya pembangunan jalan, jembatan, dermaga, gedung posyandu, poskesdes dan gedung PAUD merupakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang prasarana dan sarana ditujukan kepada pembangunan sarana dan prasarana fisik yang sangat menunjang kegiatan masyarakat.

#### **b. Kegiatan Kesehatan dan Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Maret 2018 dengan Ibu Pujia Irani, S.STP., M.Si dan Ibu Afrinda Mawarti, S.Si diketahui bahwa pelaksanaan dalam pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan kesehatan dan pendidikan yaitu Posyandu, Poskesdes dan PAUD.

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa program pembangunan dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sangat membantu masyarakat dengan adanya bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dapat membangun posyandu yang terdiri dari 3 (tiga) yaitu posyandu melati, anggrek dan mawar serta adanya Poskesdes di Desa untuk pelayanan kesehatan masyarakat di desa Kenten Laut dan PAUD untuk pendidikan di Desa Kenten Laut, (wawancara 27 Maret 2018).

Hasil pengamatan peneliti di lapangan (observasi) dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan prasarana sarana kesehatan dan pendidikan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sudah cukup baik, karena dengan adanya pembangunan kesehatan dan pendidikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah dijangkaunya.

#### **c. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Tujuan bidang ekonomi dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Wawancara kepada Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Pujia Irani, S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa peningkatan ekonomi yang diperoleh masyarakat dalam pembangunan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (wawancara 23 Maret 2018).

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa adanya penambahan modal Simpan Pinjam Perempuan untuk meningkatkan pendapatan usaha masyarakat, (wawancara 23 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa program pembangunan dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sangatlah membantu masyarakat dalam segi peningkatan ekonomi masyarakat, dikarenakan dengan adanya

bantuan dana tersebut sebagai modal dalam pengelolaan usaha masyarakat untuk kelompok usaha perempuan di desa, (wawancara 27 Maret 2018).

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa pembangunan melalui dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk modal usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu dalam pemberian dana, masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan pengelolaan usaha dagang mereka di desa, dana yang telah diberikan kepada masyarakat tersebut akan dijalankan oleh masyarakat untuk membuka usaha ataupun meningkatkan usaha mereka yang sudah ada. Akan tetapi berkembang atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan masyarakat, maka tidak adanya penambahan dana kembali dalam usaha mereka.

**d. Penambahan Modal Usaha Perempuan**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Puji Irani. S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa ada, dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masyarakat dapat terbantu dalam penambahan modal usaha, (wawancara 23 Maret 2018).

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa ada, dengan bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Masyarakat bisa sangat terbantu dalam peningkatan pendapatan usaha ekonomi mereka, (wawancara 23 Maret 2018).

Dari pendapat di atas sangat berbeda dengan yang diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kanten Laut menyatakan bahwa sebenarnya dengan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) itu sudah bagus. Namun masih adanya masalah dalam pengembalian dana sehingga dana tersebut terhambat dan tidak berkembang untuk selanjutnya, (wawancara 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 April 2018 dengan Ibu Rosiana selaku masyarakat di Desa Kanten Laut yang berhasil diminta pendapatnya bahwa dengan adanya pemberian modal dana untuk usaha, kami kelompok perempuan sangat terbantu dengan adanya penambahan modal tersebut untuk pengelolaan usaha dagang kami agar usaha dagang kami dapat meningkat.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dengan adanya bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah memberikan manfaat yang cukup baik bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan yang ingin diperoleh agar tercapai kesejahteraan. Namun dari bantuan dana yang diberikan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana tersebut.

**e. Program yang Dibuat untuk Modal Kerja Kelompok Usaha Perempuan**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Puji Irani. S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa ada yaitu program bantuan modal kerja dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (wawancara 23 Maret 2018).

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan PNPM berupa program Simpan Pinjam Perempuan sebagai bantuan modal kerja masyarakat agar dapat membuka usaha dagang, yang jumlah semua kelompoknya terdiri dari 5 (lima) orang, (wawancara 23 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kanten Laut bahwa pinjaman modal kerja usaha untuk kelompok perempuan dari pemberian modal besar atau modal kecilnya pemberian dana, (wawancara 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa dengan adanya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai modal usaha, sehingga masyarakat dapat terbantu untuk membuka dan mengembangkan usaha mereka. Namun dari bantuan dana pinjaman tersebut tidak berjalan dikarenakan anggota masyarakat tidak mengembalikan pinjaman tersebut.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dengan adanya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar masyarakat dapat terbantu dalam mengelola dan membuka usaha berdagang mereka. Namun dari bantuan pinjaman dana tersebut banyak dari masyarakat tidak mengembalikan dana sehingga dana tersebut tidak berjalan.

**f. Program yang Disiapkan untuk Perbaikan Daerah Bila Terkena Dampak Bencana**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Maret 2018 dengan Ibu Puji Irani. S.STP., M.Si selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) diketahui bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana yaitu adanya perbaikan infrastruktur.

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Bantuan rehabilitasi / rehap rumah / pos bantu prasarana sarana dibantu oleh pemerintah daerah melalui

SKPD Teknis seperti dinas sosial/kesbangpol/ transmigrasi, (wawancara 23 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa bantuan dari pemerintah setempat seperti bahan-bahan pokok, (wawancara 27 Maret 2018).

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa program yang disiapkan oleh pemerintah jika di daerah tersebut terjadi bencana, pemerintah memberikan perbaikan infrastruktur, bantuan rehabilitasi dan bantuan bahan-bahan pokok untuk daerah yang terkena dampak bencana.

4

#### **Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin**

Kesejahteraan Sosial Masyarakat adalah suatu tata kehidupan yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir batin, memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *Key Informan* dalam beberapa indikator pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

##### **A. Jumlah Pekerjaan dan Pemerataan Pendapatan**

Berdasarkan wawancara tanggal 23 Maret 2018 dengan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Puja Irani. S.STP., M.Si dan Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa cukup membantu, dengan adanya program PNPM seperti program simpan pinjam yang khusus untuk memberikan bantuan modal kepada wirausaha yang kurang modal dan kepada wirausaha yang berhenti berjualan karena kurang modal. Sehingga dengan adanya kegiatan wirausaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di desa.

Pendapat tidak senada diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa dengan adanya program PNPM simpan pinjam perempuan sebagai modal kerja dan meningkatkan pendapatan untuk masyarakat belum merata, dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang belum bisa membuka usaha dan mendapatkan lapangan kerja, (wawancara 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 April 2016 dengan Bapak Amien selaku masyarakat menyatakan bahwa memang program bantuan tersebut ada. Namun, hanya orang-orang yang mempunyai kedekatan secara emosional saja yang mendapatkan bantuan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Munawaroh selaku masyarakat menyatakan bahwa kami telah mengajukan usulan-usulan kegiatan. Namun, sampai sekarang usulan tersebut belum mendapat persetujuan. (wawancara tanggal 3 April 2018).

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan usaha kelompok belum cukup baik, dikarenakan mekanisme pencairan dana bantuan belum merata, dan hanya didapat oleh orang-orang tertentu saja.

##### **B. Kualitas Pendidikan**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Puja Irani. S.STP., M.Si dan Ibu Puja Irani. S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa dengan adanya bantuan PNPM kualitas pendidikan masyarakat dapat meningkat yang dulunya masyarakat putus sekolah kini dapat terbantu untuk dapat bersekolah dengan adanya program BOS, Apa lagi pada biaya yang murah dan dapat dijangkau agar masyarakat dengan mudah mengakses pendidikan dengan setinggi-tingginya, (wawancara 23 Maret 2018).

Pendapat tidak senada diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa dengan adanya bantuan PNPM lumayan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendidikannya, namun masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang tidak tamatan sekolah SMA dikarenakan kurang biaya untuk dapat menunjang pendidikan, (wawancara 27 Maret 2018).

4 Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 April 2018 dengan Bapak Baharudin selaku masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa meskipun adanya program bantuan BOS dari PNPM kami masyarakat masih susah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau untuk kebutuhan sekolah anak kami, sebab, jika dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan. Maka, jumlah yang didapat sangatlah kecil. (wawancara 3 April 2018).

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa adanya bantuan dana PNPM di Desa Kenten Laut belum sepenuhnya baik, karena program dana BOS yang diberikan sangatlah kecil. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah anak yang masih di usia sekolah dan membutuhkan bantuan. Sehingga dana bantuan yang diberikan harus dipecah untuk mencukupi kebutuhan tersebut.



### C. Kualitas Kesehatan yang Meningkat dan Merata

Dari indikator kesejahteraan sosial dibagi menjadi dua pertanyaan, yaitu :

#### a. Kualitas Kesehatan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Puja Irani. S.STP., M.Si dan Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa adanya program Jamkesmas dan kualitas kesehatan yang memadai dengan kegiatan penyediaan bidan desa dan posyandu di desa masing-masing, agar masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang dapat dijangkaunya, (wawancara, 23 Maret 2018).

Pendapat tidak senada diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa belum baik, masih ada masyarakat yang ingin untuk berobat tetapi tidak dapat untuk berobat dikarenakan tidak adanya biaya, (wawancara tanggal 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 April 2018 dengan Ibu Poniroh selaku masyarakat menyatakan bahwa kami selaku masyarakat merasa masih susah untuk mendapatkan pelayanan walaupun memegang kartu Jamkesmas tidak sebagai pelayanan bagi yang membayar tunai. Dan meskipun adanya bidan desa juga bidan desa enggan memberikan pelayanan gratis di luar jam kerja.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ramdhan selaku masyarakat menyatakan bahwa kami masyarakat masih susah untuk mendapatkan perawatan apalagi untuk mendapatkan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh kami, (wawancara 3 April 2018).

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan bahwa adanya bantuan dana PNPM belum sepenuhnya baik, meskipun adanya program Jamkesmas dan adanya bidan desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan agar memudahkan masyarakat dengan pembiayaan murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun masih terdapatnya masyarakat yang tidak dapat untuk menunjang kesehatan jika ingin berobat untuk mendapatkan perawatan dan obat-obatan.

#### b. Akses Kesehatan

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Ibu Puja Irani. S.STP., M.Si di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa sangat mudah, karena dengan adanya akses di bidang kesehatan masyarakat dapat pelayanan kesehatan dengan cepat, (wawancara 23 Maret 2018).

Ibu Afrinda Mawarti, S.Si selaku Kasi Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, dikarenakan akses pelayanan kesehatan sudah dibentuk per desa berupa poskesdes dan posyandu, (wawancara 23 Maret 2018).

Hal senada juga diungkapkan Bapak Akhmad selaku Kepala Desa Kenten Laut bahwa dengan adanya poskesdes dan posyandu yang dibangun di tiap desa, masyarakat lebih mudah untuk menerima pelayanan kesehatan, akses yang lebih mudah tersebut tentu sangat membantu masyarakat, (wawancara 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 3 April 2018 dengan Bapak Anton selaku masyarakat di desa Kenten Laut bahwa dengan adanya pembentukan poskesdes di desa kami, kami selaku masyarakat sangat terbantu. Sebab, jika dulu saat ingin berobat kami harus meluangkan waktu, sekarang kami lebih mudah dan tidak membuang waktu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Sukirno selaku masyarakat menyatakan bahwa pembangunan sarana kesehatan di tiap desa sangat membantu, apa lagi bagi kami selaku masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi, (wawancara 3 April 2018).

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Zainubah selaku masyarakat di desa Kenten Laut bahwa akses kesehatan yang dibangun dapat mempermudah kami dapatkan, terutama ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Kami tidak perlu lagi jauh-jauh menuju ke puskesmas kecamatan, (wawancara 3 April 2018).

Jadi, berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dengan adanya pembangunan poskesdes dan posyandu di tiap desa sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan optimal, karena walaupun secara garis besar pelaksanaan program PNPM sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM M-P. Dana PNPM difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun dalam kelompok usaha perempuan belum baik,



- karena masih kurang<sup>4</sup> kesadaran masyarakat untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan.
2. Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam kategori belum baik, karena belum meratanya pendapatan dan bantuan dana untuk pelayanan pendidikan sangat kecil serta bantuan kualitas kesehatan belum sepenuhnya dapat menunjang kebutuhan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi. 2013. Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Ridlo, Mohammad Agung. 2001. Kemiskinan di perkotaan. Semarang : Uninsula Press.
- Singarimbun. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Wirhatnolo, R Randy dan Rian Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat). Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Wulandari, Fitri. 2011. Sosiologi SMA / MA Kelas X. Jawa Tengah : Viva Pakarindo.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. 1974. Jakarta : Kesejahteraan Sosial.
- Panduan Program Inpres Desa Tertinggal Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 1993. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2008. Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- Tim Redaksi, 2010. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Transmedia.
- BKKBN. Indikator Kemiskinan. (online). (<https://fahricalm23.wordpress.com/2013/06/25/tolak-ukur-indikator-kemiskinan-menurut-badan-kordinasi-keluarga-berencana-nasional-bkkbn/>).
- BPS. 2007. Standar Kemiskinan, teori kemiskinan, (online). (<http://famuin.blogspot.com/2013/07/inilah-kriteria-miskin-versibps.html>), (diakses pada tanggal 17 Januari 2015).

# Administrative Services for Making Marriage Certificates at the Office of Religious Affairs, Jejawi District, Ogan Komering Ilir Regency

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://repository.univ-tridianti.ac.id">repository.univ-tridianti.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://eprints.upnyk.ac.id">eprints.upnyk.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://haritshijrah.wordpress.com">haritshijrah.wordpress.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches

< 30 words

Exclude bibliography      On



# Administrative Services for Making Marriage Certificates at the Office of Religious Affairs, Jejawi District, Ogan Komering Ilir Regency

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---